

**PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI (RS-RTLH) OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU (STUDY KASUS DI KECAMATAN MORO)**

Oleh:

Zalmi Hidayat

Email : [zalmie\\_chaniago07@yahoo.com](mailto:zalmie_chaniago07@yahoo.com)

Dibimbing oleh Dr.Febri Yuliani, S.Sos,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi- Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.  
0761-63277

Abstract

*The implementation is one of the series in activities are planned and carried out by the gradual implementer who have oained authority or order from executive in the form of laws that influence the implementation activities. Related of the social services program karimun district has an agency authorized to implement of home uninhabitable social rehabilitation program.*

*The aims is to help the problem of people wo have a medium economy in terms protection of residence. Residence is one of the basic needs that must be owned by everyone. This research aims to identity and analysis the implementation of home uninhabitable social rehabilitation program at the moro district.this is a descriptive qualitative study which gives a clear and detailed illustration based on the facts was found in the observation.*

*The theory that used as an analysis in this study is George C. Edward theory in widodo 2011 interprets the factors that affect one is success or failure in the implementation of home uninhabitable sosial rehabilitation program in the collection data use observation and interview technique kualitative technique.*

*After research had been done we found that the implementation of home uninhabitable program which run by social department well and has eased the burden at moro district every year. Also there are problems are face in running the implementation of home uninhabitable social rehabilitation program that are human resourches lack of public awareness and undiscipline of time in practice it.*

***Keywords: the implementation, home uninhabitable social rehabilitation program.***

### **Pendahuluan**

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana

pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman

harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam keputusan menteri sosial RI nomor : 06B/ HUK/ 2010 Indonesia masih ada lima puluh kabupaten daerah yang masih tertinggal diantaranya adalah provinsi kepulauan riau (KEPRI) di kabupaten karimun. Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999.

Kabupaten Karimun memiliki luas 7.984 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 1.524 Km<sup>2</sup> ( 152.400 Ha ) dan luas lautan sekitar 6.460 Km<sup>2</sup> atau seluas 646.000 ha, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun di kelilingi oleh lautan. Kabupaten karimun merupakan gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif untuk menata Kabupaten Karimun selama rentang waktu 20 tahun ke depan. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan

pulau Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Sebagai kabupaten kepulauan, karekeristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun.

dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim basah yang sangat di pengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun.

Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 kecamatan. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.12/2007, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 (dua belas) kecamatan. Kedua belas kecamatan tersebut yakni Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing.

Pada tahun 2012, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri atas 42

daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah RW/RT secara keseluruhan adalah sebanyak 3778 RW dan 1.060 RT. Banyak pulau-pulau terpencil yang tidak mudah diakses. Kemiskinan melanda beberapa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Moro	6,490
2	Durai	2,120
3	Kundur	5,814
4	Kundur utara	4,283
5	Kundur barat	5,418
6	Karimun	2,914
7	Buru	4,395
8	Meral	6,265
9	Tebing	2,740
Jumlah		40,439

Sumber : TNP2k (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan) tahun 2012

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena- fenomena yang ada di kabupaten karimun dalam menjalankan program RS-RTLH maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : **"Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ( Study Kasus Di Kecamatan Moro)."**

#### A. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ( RS-RTLH) di kabupaten karimun (study kasus kecamatan Moro)?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH)di kabupaten karimun (study kasus kecamatan Moro)?

kecamatan yang ada dikabupaten karimun yang menjadi permasalahan yang dihadapi

masyarakat, hampir dari beberapa kecamatan hampir yang menjadi permasalahan kemiskinan keluarga.

#### B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten karimun (study kasus kecamatan Moro).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten karimun (study kasus kecamatan Moro).

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori – teori yang didapat selama perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kagian ilmiah dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga lainnya.
  - c. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi dinas sosial kabupaten karimun dan pihak-pihak yang kerkait dalam menjalankan program RS-RTLH kedepannya.

- b. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui dan manfaat program pemerintah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dimana metode ini diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan data yang aktual dari. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. informan.

## HASIL

### A. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun (study kasus kecamatan moro)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk kehidupan tercukupi segala kebutuhan pembangunan dituangkan dan diteruskan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dinas sosial kabupaten karimun adalah mewujudkan hunian yang layak merupakan sumber kehidupan sebagai tempat perlindungan yang layak ditempati. Untuk mengatasi pembangunan harus didukung oleh suatu kebijakan. sehingga mampu memenuhi hak dasar rakyat dan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat.

Dengan ini untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni di kabupaten karimun (study kasus di kecamatan moro), penulis menggunakan teori pelaksanaan oleh George C.Edward didalam widodo (2011)

George C.Edward didalam widodo (2011) mengidentifikasi adanya empat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, meliputi indicator-indikator sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan kepada implementor. kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan program RS-RTLH dinas sosial kabupaten karimun berkomunikasi dengan masyarakat yang menerima bantuan dengan sosialisasi

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. lebih lanjut edwar menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

##### a. Sumber daya anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah

keuangan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

**b. Sumber daya peralatan (facility)**

Sumber daya peralatan merupakan sasaran yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sasaran yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam Implementasi kebijakan. dalam hal ini peralatan yang di gunakan dalam pelaksanaan program

**c. Sumber daya informasi dan kewenangan**

Sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan

**4. Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karna adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan hubungan organisasi luar dan sebagainya. Dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni diamanahkan oleh dinas sosial yang mana di bidang pemberdayaan sosial yang langsung memegang kendali sepenuhnya dalam program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni

bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak. yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

**3. Disposisi**

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanaakn kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Serta dalam pelaksanaan ini sikap pemerintah dinas sosial kabupaten karimun berjalan dengan baik

**5. Sumber daya manusia**

Sebagai daerah yang memiliki banyak pulau-pulau yang terdiri dari 12 kecamatan dengan 42 kecamatan dan 29 kelurahan yang ada di kabupaten karimun mempunyai kendala. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni. Dalam mewujudkan hunian yang layak untuk melaksanakan program dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat selesai dengan waktu yang ditentukan. Dalam program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat menyebabkan program yang

dilakukan bidang pemberdayaan sosial tidak berjalan dengan maksimal.

## **6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan program rehabilitasi sosial- rumah tidak layak huni kurang maksimal, dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial- rumah tidak layak huni dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat aktif dalam program ini tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk aktif .

Dalam program rehabilitasi sosial- rumah tidak layak huni, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial- rumah tidak layak huni tidak maksimal

## **7. Ketidaktepatan Waktu Dalam Pelaksanaan**

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagaimana yang diatur dalam peraturan bupati karimun telah ditentukan lamanya waktu pengerjaannya yaitu 120 hari kerja atau 4 bulan lamanya. Pelaksanaan kegiatan tersebut terhitung sejak dicairkan dana dari rekening oleh penerima bantuan. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di kecamatan moro yaitu banyak diantaranya membangun rumah dari awal yang artinya membongkar bangunan lama yang tidak layak untuk dihuni lagi. Selain itu waktu yang ditentukan tidak cukup, serta faktor cuaca juga mempengaruhi jika cuaca hujan maka perbaikan rumah terhenti sementara.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten karimun kecamatan moro oleh dinas sosial kabupaten karimun adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni yang dilaksanakam oleh dinas sosial di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau (study kasus di kecamatan moro) termasuk dalam katagori baik, karena program yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten karimun secara keseluruhan telah terlaksana sesuai yang diharapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program RS-RTLH di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau (study kasus di kecamatan moro) di antaranya:
  - a. Sumber daya manusia  
Sumber daya manusia kurang berkualitas serta kurangnya pegetahuan petugas/aparatur dalam program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni belum maksimal. Sehingga tenaga ahli yang berkualitas masih sedikit.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni menjadi tidak maksimal. Dalam program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan hunian yang layak, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang sadar. Hal inilah yang membuat program rehabilitasi sosial-rumah tidak layak huni belum maksimal.

## **Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai program rehabilitasi sosial-rumah

tidak layak huni yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten karimun di kecamatan moro, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada dinas sosial kabupaten karimun dalam program rehabilitasi sosial - rumah tidak layak huni. Untuk dapat melakukan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. dan mengirimkan aparatur untuk mendapatkan pelatihan sebagai referensi untuk dapat meningkatkan pemahaman sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
2. Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi sehingga dalam program rehabilitasi sosial-rumah

tidak layak huni dapat berjalan apa yang diinginkan.

3. Pengawasan harus dilaksanakan dinas sosial dalam proses pekerjaan pembangunan RS-RTLH agar dapat tepat waktu yang telah ditentukan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Widodo, Joko 2011. *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang: Bayu Media

Sumber-sumber lainnya:

Pedoman rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan

[Http://muhammadzen-](http://muhammadzen-kabkarimun.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html)

[kabkarimun.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html](http://muhammadzen-kabkarimun.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html)